



Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka

Heroza Firdaus¹, Azkya Milfa Laensadi², Gupo Matvayodha³, Fitri Nauli Siagian⁴, Ika Aryastuti Hasanah⁵

^{1,2,3,4,5}PGMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: herozafirdaus47@gmail.com

Abstrak

Implementasi kurikulum 2013 sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, masih banyak kendala yang kita ketahui sangat mempengaruhi hasil belajar, baik dari segi media yang digunakan, penilaian pada kurikulum 2013 lebih rumit dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya kemudian metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang ingin diajarkan belum efektif atau bahkan tidak sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Berdasarkan pada kajian literatur yang telah dilakukan, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dikenal dengan kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini meliputi 4 hal: ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB). Kebijakan Merdeka Belajar memiliki karakteristik yang menekankan pada kreativitas, orientasi pembelajaran pada pemecahan masalah, pembelajaran berbasis tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta sistem penilaian yang komprehensif. Hal ini berdampak pada kebutuhan pengembangan evaluasi pembelajaran.

Kata Kunci: *Evaluasi, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka*

Abstract

Implementation of the 2013 curriculum is very different from the previous curriculum, there are still many obstacles that we know greatly affect the learning outcomes, both in terms of media used, the assessment in the 2013 curriculum is more complicated than the previous curriculum then the methods used to convey the learning materials that want to be taught not effective or even incompatible with the material to be conveyed. scrutiny, analysis, and presentation of findings. According to the results of the literature review, the Ministry of Education and Culture's, Nadiem Makarim, policy is known as the Freedom of Learning policy. This policy addresses four issues: national standard school exams (USBN) developed by each school; changes to the national exam (UN) to a minimum competency assessment and character survey; educators' freedom to design lesson plans (RPP); and flexibility in new student admissions regulations (PPSB). —Merdeka Belajar is distinguished by its creativity, learning orientation toward problem solving, needs-based learning, and integration into the workplace, as well as a comprehensive assessment system. This has an impact on the need for learning evaluation development.

Keyword: *Evaluation, 2013 curriculum, Freedom of Learning*

PENDAHULUAN

Sejatinya pendidikan formal evaluasi begitu penting keberadaannya, dengan adanya evaluasi guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar, begitupun pentingnya dalam evaluasi pembelajaran (Iskandar, 2020). Sedangkan pengembangan kurikulum

evaluasi dapat memberikan informasi untuk perencanaan perbaikan kurikulum yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem (Iskandar & Putri, 2020). Permasalahan pendidikan yang ada saat ini direspons Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya penulis sebut dengan Kemendikbud) dengan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Nadiem Makarim selaku Kemendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep Merdeka Belajar yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Kebijakan ini dimulai dengan perbaikan standar mutu pendidikan (Yustiyawan, 2019).

Nadiem juga memberikan kritikan kepada lembaga pendidikan saat ini yang gagal menciptakan penilaian pembelajarannya sendiri. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Di antara perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah (1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan 4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB) (Faiz et al., 2022). Kebijakan visioner Kemendikbud yang menggebrak paradigma kurikulum lama ini menarik untuk dikaji, maka dari itu penulis berusaha mengungkap implikasi kebijakan Merdeka Belajar terhadap pengembangan desain evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini berupaya mendiskusikan analisa terkait evaluasi program kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dengan demikian peneliti ingin menciptakan pustaka baru untuk melihat seberapa jauh perkembangan kurikulum 2013 dan merdeka belajar saat ini.

METODE

Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) penulisan mengumpulkan sejumlah referensi tentang analisis evaluasi program kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka baik itu jurnal, maupun dokumen peraturan pemerintah yang terkait referensi tersebut dikaji secara seksama untuk memperoleh penjelasan yang rinci terkait penilaian autentik di dunia pendidikan mengacu pada kajian tersebut, peneliti kemudian merumuskan pandangannya mengenai pelaksanaan penilaian autentik di sekolah atau madrasah yang meliputi analisis evaluasi program kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kurikulum

Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan kebijakan kurikulum (Iskandar, 2019). Dalam sejarah kurikulum di Indonesia paling tidak telah mengalami sebelas kali dinamika perubahan. Dimulai dari masa prakemerdekaan dengan bentuk yang sangat sederhana, dan masa kemerdekaan yang terus menerus disempurnakan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan tahun 2013 (Warits, 2019). Berbagai kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada hasil analisis, evaluasi, prediksi dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Dalam konteks ini kurikulum sebagai produk kebijakan bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif (Jono, 2016). Dinamis sebab terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta terbuka terhadap kritik. Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada konteks zamannya, dan relatif sebab kebijakan kurikulum yang dihasilkan dipandang bagus atau sempurna pada zamannya, dan akan menjadi tidak relevan pada zaman-zaman berikutnya.

Oleh karenanya prinsip dasar dalam kebijakan kurikulum adalah *change and continuity* yaitu perubahan yang dilakukan secara terus menerus (Daniel, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah menetapkan Standar Isi untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan sesuai tujuan pendidikan Nasional. Standar Isi tersebut menjadi acuan bagi para praktisi pendidikan untuk mengetahui ruang lingkup bahan atau materi yang harus disampaikan. Di samping itu, menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kompetensi para peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai jenjang dan sesuai jenis pendidikan yang ditempuh. Setiap kompetensi yang diharapkan pada peraturan pemerintah berimplikasi terhadap proses pembelajaran dan asesmen yang diharapkan

Evaluasi kurikulum 2013

Indonesia sendiri lahirnya kurikulum 2013 revisi merupakan kurikulum terakhir setelah 10 kali mengalami perubahan kurikulum yang mendasar. Proses perubahan kurikulum tersebut pada satu sisi dapat dipahami sebagai suatu dinamika konstruktif mengingat setiap pakar pendidikan dan pengambil kebijakan memiliki pandangan yang beragam dalam memandang pendidikan. Selain itu perubahan kurikulum adalah sesuatu yang harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan suatu konsekuensi logis atas tuntutan dan tantangan zaman.



Pada masyarakat modern yang dinamis dan sarat teknologi dan pengetahuan, penentuan prioritas tujuan pendidikan dan penyusunan kurikulum cenderung mengalami banyak perdebatan, mengingat saratnya muatan pengetahuan yang harus masuk kurikulum dan bervariasinya kepentingan dan aspirasi berbagai stakeholders pendidikan. Karena itu, bukan hal yang mudah untuk menyamakan persepsi tentang mata pelajaran dan organisasi materi pelajaran dalam kurikulum. Dengan kata lain, melimpahnya volume pengetahuan, bervariasinya filsafat pendidikan dan beragamnya teori belajar dan pengembang kurikulum, maka seleksi materi ajar, pemilihan kegiatan belajar dan penetapan pengalaman belajar, serta sistem evaluasi kurikulum dan pembelajaran, akan melalui suatu proses perdebatan yang tidak mudah (Angga et al., 2021).

Dapat dijelaskan kurikulum 2013 berakar dari landasan filosofi bangsa Indonesia, landasan sosiologis, psikopedagogis, teoritis dimana dapat dirangkum dalam tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Kemendikbud melalui kurikulum 2013 revisi merumuskan pembelajaran abad 21 sebagai

paradigma baru dalam institusi pendidikan yang menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Litbang Kemdikbud, 2013). Adapun penjelasan mengenai *framework* pembelajaran abad ke-21 menurut (BSNP:2010) dirumuskan dalam keterampilan 4C diantaranya *critical-thinking and problem-solving skills, (communication and collaboration skills, (c) creativity and innovation skills*). Selain itu pada kurikulum 2013 juga dikembangkan literasi teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan pendidikan karakter pada pengembangan karakter (*character building*) dan nilai spiritual (*spiritual value*). Keseluruh standar pendidikan di Indonesia ini dirumuskan menjadi *Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard (IP-21CSS)* (Kurniawan, 2019).

Dalam evaluasi asesmen autentik memberikan cara penilaian yang cukup luas terhadap perkembangan siswa. Tidak hanya aspek kognitif yang menjadi acuan utama penilaian, melainkan juga aspek afektif dan psikomotor. Implementasi Kurikulum 2013 yang sarat dengan karakter dan kompetensi, disertai dengan penilaian secara utuh, terus menerus, dan berkesinambungan, agar dapat mengungkap berbagai aspek yang diperlukan dalam mengambil suatu keputusan. Penilaian tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan. Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam proses penilaian ialah pendidik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 104 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Hasil Belajar dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk autentik dan non-autentik (Puspa et al., 2014).

Kebijakan Merdeka Belajar

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata "policy" dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, disandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata educational policy yang berasal dari 2 kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan .

Analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan.

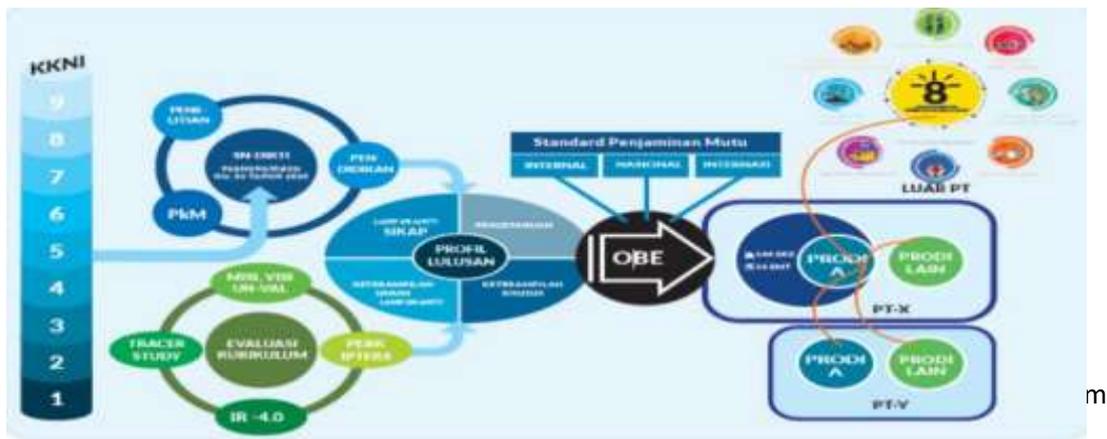
Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya

Merdeka belajar bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Adapun secara umum program ini bukan untuk menggantikan program yang telah berjalan, tujuan utamanya adalah memperbaiki sistem yang sudah ada. Merdeka belajar yang digagas Kemendikbud menawarkan proses pembelajaran yang lebih sederhana. Adit memaparkan bahwa penyederhanaan pelaksanaan pembelajaran tersebut seperti: (1) RPP (rancangan pelaksanaan pembelajaran) yang dibuat oleh guru tidak perlu terlalu banyak dan rumit seperti sebelumnya, (2) sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu tetap dilaksanakan namun lebih luwes dalam pengimplemenmtasiannya, (3) mulai tahun 2021 ujian nasional yang selama ini menjadi beban bagi pelaku pembelajaran diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, dan (4) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dialihkan menjadi asesmen berkelanjutan seperti portofolio (tugas kelompok, karya tulis, praktikum, dan sebagainya) (Adit, 2019). Jika sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian dalam merdeka belajar ini diarahkan pada asesmen berkelanjutan, maka dapat disepakati bahwa asesmen autentik yang pernah diimplementasikan pada kurikulum 2013 masih relevan untuk diintegrasikan dengan program tersebut.

Pada diskusi belakangan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim mengubah kurikulum 2013 menjadi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) pada tahun 2019. Konsep MBKM terdiri dari dua konsep yaitu “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”. Merdeka belajar adalah kebebasan berpikir dan kebebasan inovasi (Ainia, 2020). Sedangkan kampus merdeka adalah lanjutan program merdeka belajar untuk pendidikan tinggi. Transformasi pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila (Kemdikbud, 2021). Sejalan dengan World Economic Forum (2016), pelajar harus memiliki 16 keahlian di abad ke-21. Secara garis besar, 16 keahlian ini terbagi menjadi tiga yaitu literasi, kompetensi, dan kualitas karakter. Selain itu, untuk menghadapi perubahan sosbud, dunia kerja, dunia usaha, dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, mahasiswa harus dipersiapkan untuk dapat mengikuti perubahan ini. Oleh sebab itu, setiap instansi pendidikan harus mempersiapkan literasi bari dan orientasi terbimbing dalam bidang pendidikan (Lase, 2019). Persiapan Perguruan Tinggi dapat dilakukan dengan cara merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal dan selalu relevan melalui Kurikulum MBKM.

Walaupun konsep Merdeka Belajar sudah disosialisasikan dan diperkenalkan secara langsung maupun melalui beberapa media online, masih banyak pendidik dan orang tua yang bingung dengan konsep MBKM (CNN Indonesia, 2021). Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat menjadi acuan para akademisi maupun praktisi untuk mengenal dan memperdalam wawasan mengenai MBKM dan kurikulum MBKM.

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan atau pembelajaran untuk menghasilkan suatu learning outcomes (capaian pembelajaran) yang bukan hanya sekedar kumpulan mata kuliah. Kurikulum memiliki beberapa elemen dasar yaitu tujuan, kompetensi, isi, kriteria penilaian, dan standar pembelajaran (Kodrat, 2021). Elemen-elemen tersebut terkandung didalam Kurikulum MBKM. Kurikulum MBKM mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 dan pendekatan OBE (*Outcome based Education*) untuk mengikuti pola dan tahapan sebagaimana yang selama ini dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum program studi. Implementasi kebijakan dan perkembangan kurikulum MBKM mengakomodasi dan mengacu pada regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS (Vhalery et al., 2022). Kerangka implementasi dan pengembangan kurikulum dalam kebijakan MBKM dapat dideskripsikan berikut ini:



Kurikulum MBKM yang merupakan kurikulum terbaru di Indonesia, lebih menekankan proses kegiatan pembelajaran diluar dan didalam kampus. Hal ini dapat diketahui dari pematangan delapan kegiatan pembelajaran yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik yang merupakan inti dari perubahan kurikulum. Dari sisi penilaian, MBKM memfokuskan penilaian karakteristik untuk menanamkan nilai pancasila dan bhineka tunggal ika yang merupakan ciri khas kebangsaan Indonesia. Tidak hanya itu, instrumen penilaian pun ada yang dikembangkan bahkan diubah untuk memperbaiki mutu pendidikan dan output lulusan yang sesuai dengan dunia industri, dunia usaha, persiapan karir di masa mendatang sesuai dengan perkembangan zaman.

SIMPULAN

Evaluasi kurikulum memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya evaluasi kita tidak akan tahu kelemahan dan kekuatan di dalam perencanaan maupun proses implementasi kurikulum yang telah digunakan. Dan menjadikan hal tersebut sebagai umpan balik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti halnya; orang tua, guru, pengembang kurikulum masyarakat, dll. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang akan datang sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan seefektif mungkin. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah eektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Evaluasi kurikulum memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya evaluasi kita tidak akan tahu kelemahan dan kekuatan di dalam perencanaan maupun proses implementasi kurikulum yang telah digunakan. Dan menjadikan hal tersebut sebagai umpan balik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti halnya; orang tua, guru, pengembang kurikulum masyarakat, dll. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang akan datang sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan seefektif mungkin. Sedangkan kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Adapun secara umum program ini bukan untuk menggantikan program yang telah berjalan, tujuan utamanya adalah memperbaiki sistem yang sudah ada. Merdeka belajar yang digagas Kemendikbud menawarkan proses pembelajaran yang lebih sederhana. Selanjutnya kurikulum MBKM yang merupakan kurikulum terbaru di Indonesia, lebih menekankan proses kegiatan pembelajaran diluar dan didalam kampus. Hal ini dapat diketahui dari pematangan delapan kegiatan pembelajaran yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan membangun

desa/kuliah kerja nyata tematik yang merupakan inti dari perubahan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2021). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2541–2549. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. *PROSPECTS*, 49(1), 91–96. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3>
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2410>
- Iskandar, W. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.35931/am.v4i1.109>
- Iskandar, W. (2020). Evaluasi Program Pembelajaran Berbasis Hots (Higher Order Thinking Skills) Di Mi At-Taqwa Guppi Wojowalur Yogyakarta Tahun aJARAN 2018/2019. *Jurnal Bunayya*, 1(3), 168–195. <http://jurnal.stit-al-ittihadiyahlabura.ac.id/index.php/bunayya/article/view/87>
- Iskandar, W., & Putri, F. A. (2020). Persepsi Kepala Madrasah Ibtidaiyah terhadap Kinerja Supervisi Manajerial Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kota Yogyakarta. *Dirāsāt Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 158–181.
- Jono, A. A. (2016). Studi Implementasi Kurikulum Berbasis Kkni Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di Lptk Se-Kota Bengkulu. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 57–68. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/148>
- Kodrat, D. (2021). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i1.60>
- Kurniawan, S. (2019). Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia. *Intizar*, 25(1), 55–68. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3242>
- Puspa, D., Pradyani, S., Marhaeni, A. A. I. N., & Suarni, N. K. (2014). Pengaruh Penerapan Asesmen Kinerja Terhadap Kemampuan Menulis Dalam Bahasa Jepang Dengan Kovariabel Kemampuan Verbal Pada Siswa Kelas Xii Ipb Sma Negeri 1 Banjarnegara. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 4.
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>
- Warits, A. (2019). Manajemen pengembangan kurikulum pendidikan madrasah dalam mewujudkan madrasah bermartabat. *JPIK September*, 2(2), : 496-525.
- Yustiyawan, R. H. (2019). Penguatan Manajemen Pendidikan Dalam Mutu Pendidikan Tinggi Studi Kasus di STIE IBMT Surabaya. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v4n1.p1-10>